



LAKIP TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERIKANAN**

Jl. Letkol Pol. Toegino-Kuala Tungkal, Tlp/Fax. 0742 21023

Email : diskan.tanjabbarkab@gmail.com



**DINAS PERIKANAN DAN KEPERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2017 yang mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Kuala Tungkal,
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG
KABUPATEN TANJUNGPINANG
DINAS PERIKANAN
Ir. H. LABUR RUSTAM, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590129 198503 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung barat selama tahun 2017. Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung barat dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi | 3 |
| 1.3. Struktur Organisasi | 3 |
| 1.4. Aspek strategis..... | 8 |
| 1.5. Landasan Hukum | 15 |
| 1.6. Maksud dan Tujuan | 20 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 20 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA | 23 |
| 2.1. Rencana Strategis..... | 24 |
| 2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) | 25 |
| 2.3. Kebijakan dan Program..... | 27 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 31 |
| 3.1. Gambaran Umum | 31 |
| 3.2. Pengukuran Kinerja..... | 32 |
| 3.3. Prestasi IKU..... | 35 |
| 3.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 39 |
| 3.5. Realisasi Anggaran..... | 60 |
| 3.6. Analisis Efisiensi | 66 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP | 70 |
| | |
| LAMPIRAN | 72 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1. Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan | 5 |
| 2. Tabel 1.1. Analisis Penetapan Strategi Organisasi..... | 11 |
| 3. Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) DPK Tahun 2017 | 26 |
| 4. Tabel 3.1. Target dan Capaian IKU DPK Tahun 2016-2017 | 38 |
| 5. Tabel 3.2. Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2017 | 40 |
| 6. Tabel 3.3. Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2012-2017 | 42 |
| 7. Tabel 3.4. Target dan Realisasi IKU Perikanan Budidaya Tahun 2017..... | 43 |
| 8. Tabel 3.5. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012-2017 | 44 |
| 9. Tabel 3.6. Target dan Realisasi IKU Produksi Produk Olahan Tahun 2017 | 45 |
| 10. Tabel 3.7. Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI dan UPR Tahun 2017 | 46 |
| 11. Tabel 3.8. Perkembangan Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI Tahun 2012-2017..... | 47 |
| 12. Tabel 3.9. Target dan Realisasi IKU Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017..... | 49 |
| 13. Tabel 3.10. Perkembangan Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2017 | 50 |
| 14. Tabel 3.11. Target dan Realisasi IKU Jumlah Unit Pengolahan Ikan Tahun 2017 | 51 |
| 15. Tabel 3.12. Target dan Realisasi IKU Persentase Produksi dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Ikan Tahun 2017 | 53 |
| 16. Tabel 3.13. Target dan Realisasi IKU Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2017 | 53 |
| 17. Tabel 3.14. Target dan Realisasi IKU Jumlah Kapal Perikanan >5 GT Tahun 2017 | 55 |
| 18. Tabel 3.15. Target dan Realisasi IKU Persentase Pelestarian Sumberdaya Perikanan Tahun 2017 | 57 |
| 19. Tabel 3.16. Target dan Realisasi IKU Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru Tahun 2017 | 60 |
| 20. Tabel 3.17. Rincian Anggaran dan Capaian Keuangan Dinas Perikanan | |

| | |
|---|----|
| Tahun 2017 | 61 |
| 21. Tabel 3.18. Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2012-2017 | 62 |
| 22. Tabel 3.19. Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2017 | 64 |
| 23. Tabel 3.20. Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2017 | 64 |
| 24. Tabel 3.21. Target dan Realisasi Bantuan Kapal Penangkapan Ikan Tahun 2017 | 65 |
| 25. Tabel 3.22. Analisis Efisiensi Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2017 | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1. Gambar 3.1. Grafik Persentas1 IKU Dinas Tahun 2016-2017 | 39 |
| 2. Gambar 3.2.Grafik Pola Penyerapan Anggaran Tahun 2017 | 61 |
| 3. Gambar 3.3. Grafik Pertumbuhan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2012-2017 | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2017 merupakan tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sekaligus merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang perikanan dan kelautan. Pembangunan perikanan dan kelautan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Arah kebijakan Dinas Perikanan tahun 2017 meliputi (1) Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan, (2) Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju keamanan produk perikanan dan kelautan, serta (3) Peningkatan Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal dan berkelanjutan.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan di lingkup Dinas Perikanan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01.3 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016-2021.

Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diurai per tahun serta rencana indikasi pendanaannya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Perikanan sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Parturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah, yang menegaskan bahwa Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok *“melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan”*. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

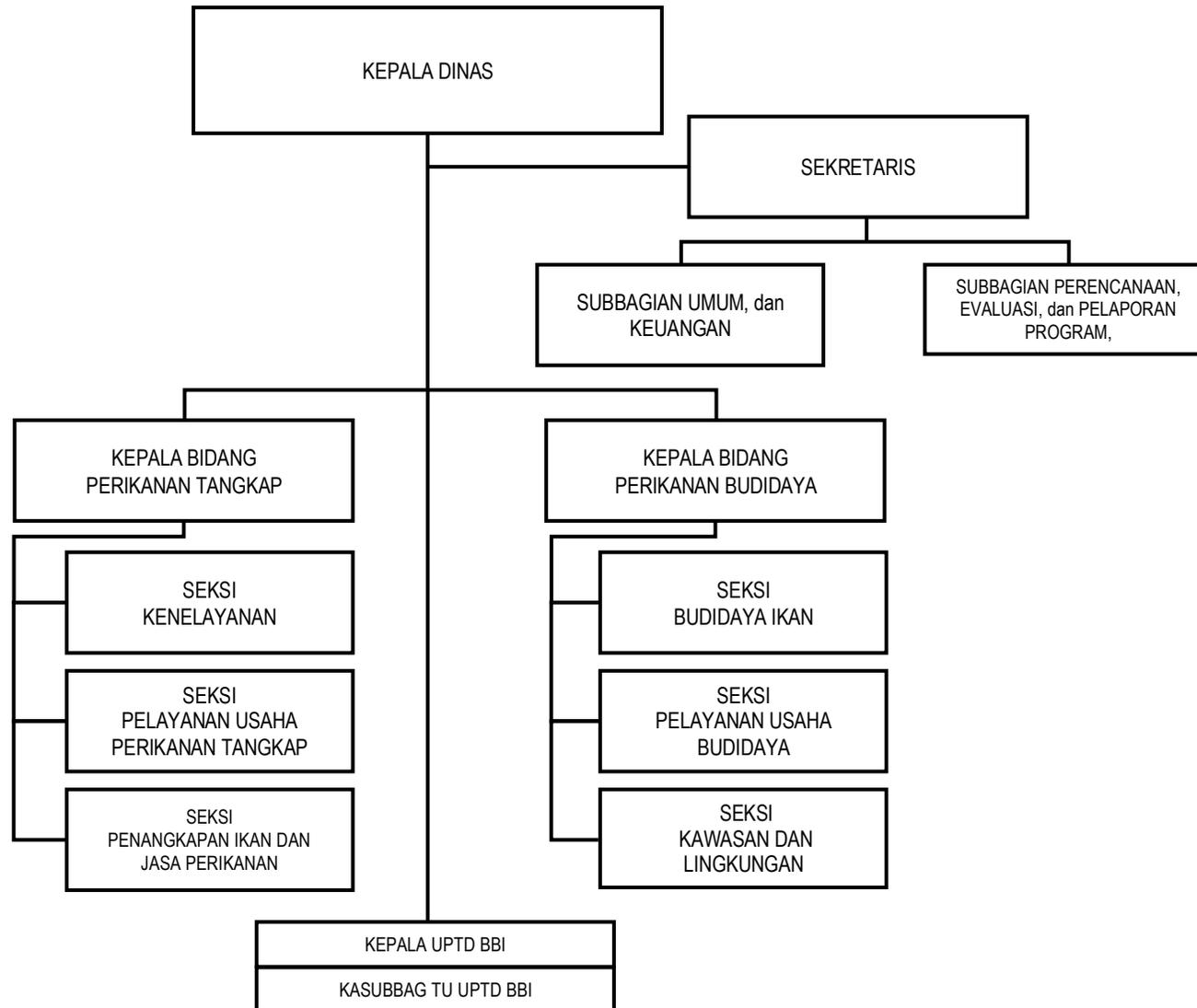
1.3. Struktur Organisasi

Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit Perangkat Daerah Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
4. 2 (dua) orang Kasubbag;
5. 6 (enam) orang kasi;
6. 1 (satu) orang Kepala UPTD; dan
7. 1 (satu) Orang Kepala TU UPTD.

Setiap Bidang dibantu oleh staf / Fungsional Umum sebagai unsur teknis pelaksana. Selengkapnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 1 :

**Tabel 1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibantu oleh Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang (Kabid), yaitu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas, yaitu :

1. Bagian Sekretariat

Memberikan tugas pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sekretariat terdiri dari :

- ✓ Kasubbag Umum dan Keuangan
- ✓ Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

2. Bidang Perikanan Tangkap

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- ✓ Kasi Kenelayanan
- ✓ Kasi Pelayanan Usaha Budidaya
- ✓ Kasi Kawasan dan Lingkungan

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 70 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak lima Orang terdiri dari :

- Golongan IV/c : 1 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/a : 3 Orang

b. Golongan III, sebanyak 20 Orang terdiri dari :

- Golongan III/d : 4 Orang
- Golongan III/c : 8 Orang
- Golongan III/b : 6 Orang
- Golongan III/a : 2 Orang

c. Golongan II, sebanyak tiga Orang terdiri dari :

- Golongan II/c : 3 Orang

2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak satu Orang terdiri dari :
 - Magister Ekonomi - ME : 1 Orang
 - b. Sarjana (S1), sebanyak 29 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Perikanan : 15 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 4 Orang
 - Sarjana Hukum : 2 Orang
 - Sarjana Teknik : 1 Orang
 - Sarjana Peternakan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
 - Sarjana Sosial Islam : 1 Orang
 - c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 1 Orang
 - d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 34 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 10 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 56 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. PNS, sebanyak 28 Orang
- b. TKS, sebanyak 1 Orang
- c. TKK sebanyak 40 Orang

1.4. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

1. Kekuatan (strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- a) Dinas Perikanan adalah Dinas Teknis sebagai Pengelola Perikanan dan Kelautan.
- b) Adanya pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan dan penampung/pengelola hasil perikanan).
- c) Sarana/prasarana yang dimiliki.
- d) SDM sesuai bidang tugas yang dimiliki.

2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- a) Rendahnya Penguasaan teknologi di bidang perikanan dan kelautan.
- b) Terbatasnya dana pembangunan bidang perikanan dan kelautan.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- d) Belum memadainya SDM secara kualitas maupun kuantitas.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a) Minat masyarakat pada usaha bidang Perikanan dan Kelautan.
- b) Potensi / sumberdaya usaha di bidang Perikanan dan Kelautan
- c) Minat Investor pada Bidang Perikanan dan Kelautan
- d) Dinamika keseimbangan Kelompok Tani Ikan dan Nelayan

4. Ancaman (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- a) Era Globalisasi.
- b) Stabilitas Keamanan dan Rawan Bencana Alam
- c) Kurangnya modal usaha.
- d) Pola usaha yang masih tradisional.

Analisa lingkungan strategis dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor internal yang merupakan Strength (*kekuatan*) dan Weaknesses (*kelemahan*) serta faktor eksternal yang merupakan Opportunity (*peluang*) dan Threats (*ancaman*) mempengaruhi keberhasilan pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Analisa yang di lakukan yaitu pencermatan, pembobotan terhadap masing-masing point dari Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats sehingga dapat dikatakan juga Analisa SWOT. Masing-masing point dari

faktor internal diberikan bobot sehingga total bobot mencapai 100. Demikian juga pada faktor eksternal. Setelah pembobotan, masing-masing point faktor internal dan faktor eksternal diberikan Rating menurut nilai kepentingannya. Bobot yang ada dikalikan dengan rating akan mendapatkan skore. Berdasarkan skore yang diperoleh maka urutan prioritas yang paling mempengaruhi keberhasilan Pembangunan di Bidang Perikanan dan Kelautan dapat diketahui lebih jelas pada Table 1.1.

Guna mengetahui secara lebih jelas bagaimana perhitungan analisa Lingkungan Strategis dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1.
Analisis Penetapan Strategi Organisasi
Matrik SWOT

| Lingkungan Strategis 1 | Bobot 2 | Rating 3 | Skore 4 | Prioritas 5 |
|--|------------|-------------|------------|----------------|
| A. STRENGTH (KEKUATAN) | | | | |
| 1) Dinas Perikanan adalah Dinas Teknis sebagai Pengelola Perikanan dan Kelautan. | 20 | 4 | 90 | I |
| 2) Adanya pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan dan penampung/pengelola hasil perikanan). | 15 | 3 | 80 | II |
| 3) Sarana/prasarana yang dimiliki. | 10 | 2 | 70 | III |
| 4) SDM sesuai bidang tugas yang dimiliki. | 5 | 1 | 60 | IV |
| B. WEAKNESS (KELEMAHAN) | | | | |
| 1) Rendahnya Penguasaan teknologi di bidang perikanan dan kelautan. | 20 | 4 | 90 | I |
| 2) Terbatasnya dana pembangunan bidang perikanan dan kelautan. | 15 | 3 | 80 | II |
| 3) Belum memadainya sarana dan prasarana | 10 | 2 | 70 | III |
| 4) Belum memadainya SDM secara kualitas maupun kuantitas | 5 | 1 | 60 | IV |
| | 100 | | | |

| Lingkungan Strategis 1 | Bobot 2 | Rating 3 | Skore 4 | Prioritas 5 |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------|
| C. OPORTUNITY (PELUANG) | | | | |
| 1) Minat masyarakat pada usaha bidang | 20 | 4 | 90 | I |

| | | | | |
|--|-----|---|----|-----|
| Perikanan dan Kelautan. | | | | |
| 2) Potensi / sumberdaya usaha di bidang Perikanan dan Kelautan | 15 | 3 | 80 | II |
| 3) Minat Investor pada Bidang Perikanan dan Kelautan | 10 | 3 | 70 | III |
| 4) Dinamika keseimbangan Kelompok Tani Ikan dan Nelayan | 5 | 1 | 60 | IV |
| D. THREATS (ANCAMAN) | | | | |
| 1) Era Globalisasi. | 20 | 5 | 90 | I |
| 2) Stabilitas Keamanan dan Rawan Bencana Alam | 15 | 3 | 80 | II |
| 3) Kurangnya modal usaha. | 10 | 2 | 70 | III |
| 4) Pola usaha yang masih tradisional. | 5 | 1 | 60 | IV |
| | 100 | | | |

1.4.1. Strategi Alternatif

Setelah diketahui poin-poin dalam lingkungan strategis selanjutnya ditentukan strategi alternatif, ada 4 (empat) strategi alternatif yaitu :

A. Strategi S - O

Yaitu kombinasi antara Strength (S) dan Opportunity (O).strategi ini adalah mengoptimalkan Strength (kekuatan) guna memanfaatkan Opportunity (peluang).

B. Strategi S - T

Yaitu kombinasi antara Strength (S) dan Threats (T). Dengan strategi ini kita berusaha mengoptimalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada.

C. Strategi W - O

Yaitu kombinasi antara Weakness (kelemahan) dan Opportunity (O). Dengan strategi ini kita mencari solusi mengatasikelemahan yang ada dalam memanfaatkan peluang.

D. Strategi W - T

Yaitu kombinasi antara Weakness (W) dan Threats (T). Pada strategi ini kita berusaha mengatasi kelemahan dalam rangka menghadapi ancaman yang ada.

Bagaimana strategi yang ditentukan dari keempat jenis strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.2. Strategi - strategi Opportunity

- a. Dinas Perikanan sebagai Dinas Teknis Pengelola. Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan dapat berperan mengembangkan potensi daerah guna menunjang tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya petani ikan dan Nelayan.
- b. Dengan perencanaan kerja yang matang dan pedoman kerja yang baik dan tertata diikuti motivasi kerja karyawan dengan SDM yang sesuai bidang tugasnya serta mengoptimalkan penggunaan sarana/prasarana yang dimiliki dapat memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat yang memiliki minat yang tinggi untuk mengembangkan usaha di Bidang Perikanan dan Kelautan. Adapun bentuk pelayanan dapat berupa pembinaan kelembagaan kelompok guna meningkatkan dinamika kelompoknya, mengusahakan permodalan kelompok untuk mengembangkan usaha dengan menarik investor.

1.4.3. Strategi Strength - Threats (ST)

- a. Motivasi kerja karyawan yang tinggi merupakan modal bagi Dinas Perikanan untuk menjadi Pengelola yang profesional sehingga mampu menciptakan usaha di Bidang Perikanan dan Kelautan yang dapat bersaing di Era Globalisasi dan Perdagangan bebas.
- b. Perencanaan yang matang dan pedoman kerja yang tertata didukung dengan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada diharapkan mampu mengatasi situasi dan kondisi apapun termasuk pengaruh stabilitas keamanan dan kondisi alam.
- c. Pemberdayaan karyawan dengan SDM yang sesuai bidang tugas yang dimiliki melalui pembinaan teknis secara terus menerus diharapkan dapat membantu mengatasi kurangnya permodalan dengan cara kredit perbankan atau kemitraan dengan investor sehingga akan berdampak pada perubahan pola usaha tradisional kearah usaha berwawasan agribisnis.

1.4.4. Strategi Weakness - Opportunity (WO)

- a. Alokasikan dana yang tersedia sesuai urutan prioritasnya serta manfaatkan minat investor pada usaha Bidang Perikanan dan Kelautan agar mampu mengimbangi minat masyarakat yang tinggi pada usaha Bidang Perikanan dan Kelautan.
- b. Pembentukan *Team Work* untuk mengatasi belum memadainya SDM secara kualitas dan kuantitas serta memanfaatkan dinamika lembaga kelompok agar lebih aktif berkoordinasi dengan Dinas

sehingga sarana kendala operasional yang belum memadai dapat teratasi.

1.4.5. Strategi Weakness - Threats (WT)

- a. Manfaatkan seefisien mungkin dana pembangunan yang ada dalam rangka pemenuhan modal usaha petani ikan dan nelayan sehingga mampu mengubah pola usaha tradisional ke arah usaha agribisnis.
- b. Tingkatkan kualitas/kuantitas SDM yang dimiliki dalam menghadapi era globalisasi.
- c. Optimalkan penggunaan sarana operasional yang belum memadai agar mampu mengatasi timbulnya bencana alam

1.5. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pembangunan sektor perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang -

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petubjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaen Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
17. Peratiran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 Nomor 41);
18. Paeraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 65);
 21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 38);
 22. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 916/Kep.Bup/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19/Kep.Bup/KEU/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017.

1.6. Maksud dan Tujuan

LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LAKIP ini adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.7. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2016-2021 khususnya di bidang perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas” serta mengacu pada misi ketiga yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan Perikanan”.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Dinas Perikanan telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), hal ini dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dinas Perikanan melakukan penerapan pengelolaan kinerja tersebut secara penuh, termasuk melakukan penyempurnaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik. Adapun upaya perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan riveu Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 - 2021 dengan memetakan peta strategi dan indikator kinerja dengan tiga Sasaran Strategis (SS) dan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan dan kelautan.

- 2) Penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, sebagai perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas dan berjenjang antara Eselon II dengan Eselon III dan Eselon IV.
- 3) Memperkuat sistem monitoring capaian kinerja dinas, termasuk didalamnya sistem pengumpulan data kinerja.
- 4) *Cascading* Sasaran Strategis dan indikator kinerja sampai level individu/staf.
- 5) Penerapan sistem penilaian kinerja individu/pegawai berbasis informasi dan Teknologi.

2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016 - 2021

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari eselon III, dan eselon II keatas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasikan secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis

maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Secara terinci, IKU pembangunan kelautan dan perikanan dari sasaran strategis di atas beserta targetnya pada tahun 2017, sebagaimana pada Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan
Tahun 2017

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan | Jumlah Produksi Perikanan | 25.112 |
| | | - Perikanan Tangkap (Ton) | 22.790 |
| | | - Perikanan Budidaya (Ton) | 2.102 |
| | | - Produk Olahan (Ton) | 220 |
| | | Jumlah Produksi Benih Ikan (Ribuk Ekor) | 550.000 |
| | | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/thn) | 32,80 |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat Perikanan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Yang Tangguh | Jumlah Unit Pengolah Ikan (Unit) | 15 |
| | | Persentase Produksi dan Penerapan Teknologi Pengolahan Ikan (%) | 10 |
| | | Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) | 4.500 |
| | | Jumlah Kapal Perikanan >5 GT (Unit) | 20 |
| | | Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | 2 |
| 3. | Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan secara Optimal dan Berkelanjutan | Jumlah Benih Ikan yang Ditebar (Restocking) pada Kawasan Reservat dan Kawasan Konservasi Perikanan (Ekor) | 60.000 |
| | | Persentase Pelestarian Sumberdaya Perikanan (%) | 30 |
| | | Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru (Kawasan) | 1 |

Keterangan : Kalimat yang bercetak tebal merupakan IKU yang ada dalam RPJMD (sebelum Perubahan)

2.3. Kebijakan dan Program

2.3.1. Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas taraf hidup pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- 1) Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan.
- 2) Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju hasil perikanan dan kelautan yang tangguh.
- 3) Peningkatan Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang optimal dan berkelanjutan.

2.3.2. Program Dinas Perikanan

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Tahun 2017, Pembangunan Perikanan dan Kelautan tersebut diimplementasikan kedalam 7 program sebagai berikut:

2.3.2.1. Program Rutin

2.3.2.1.1. Program Pelayanan Administrasi

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan;
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

2.3.2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

2.3.2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

2.3.2.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengembangan SDM.

2.3.2.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja;
- Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan.

2.3.2.2. Program Utama

2.3.2.2.1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan;
- Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
- Pengembangan sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya;
- Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu.
- Pengawasan Hama Penyakit dan Lingkungan;
- Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN; dan
- Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau.

2.3.2.2.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan;
- Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
- Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan;

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
- Pembinaan dan Pengawasan Mutu hasil Perikanan dan SDI.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pelaksana sebahagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian

kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

Adapun media pengukuran kinerja terdiri atas :

1. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang ditentukan di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang ditentukan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. >100 = Amat Baik
2. $80 - 100$ = Baik
3. $50 - 79$ = Cukup
4. < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan, berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari :

3.2.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

3.2.2. Indikator kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2.3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- a) Masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- b) Keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c) Hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah,

outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

3.3. Prestasi IKU Tahun 2017

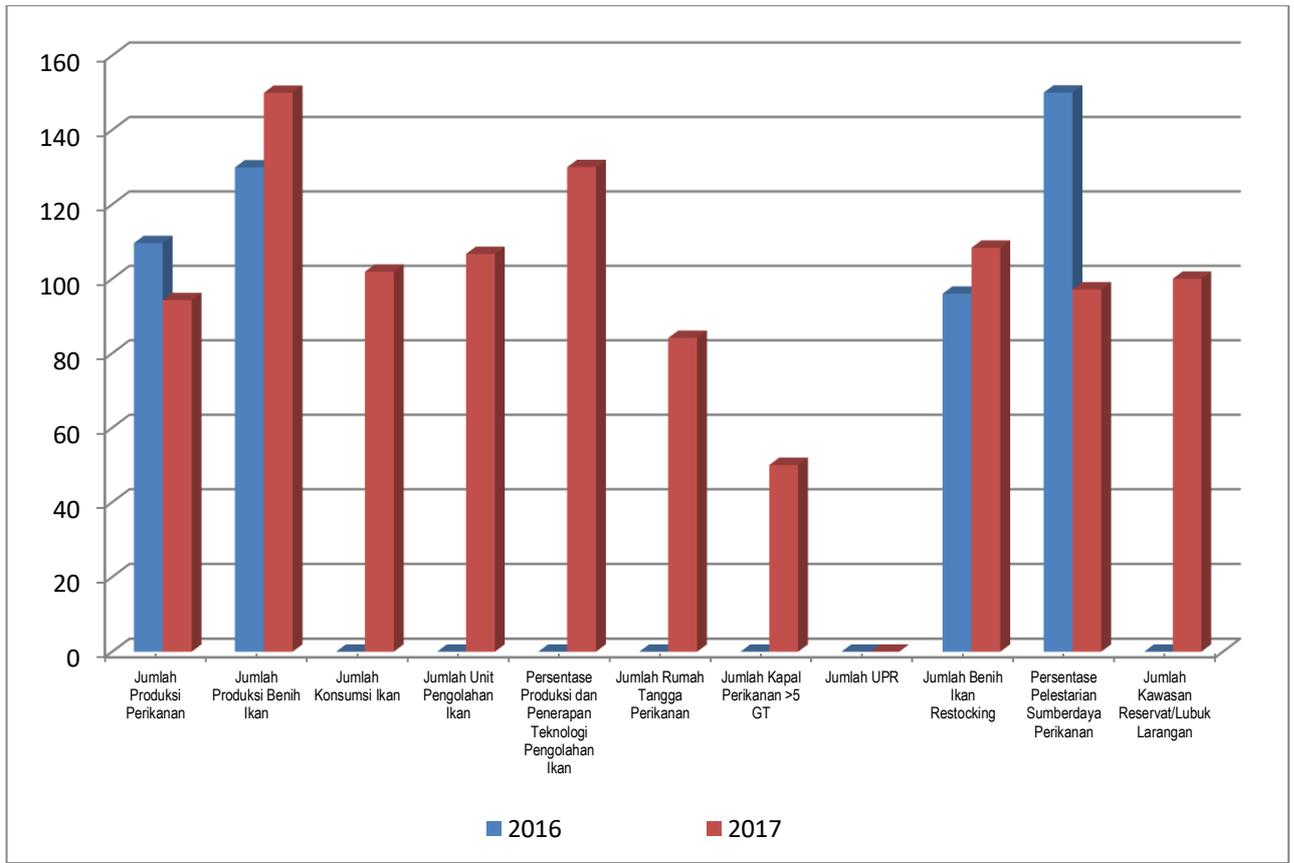
Prestasi dari 11 IKU tahun 2017 yang diraih Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijumpai sebanyak lima indikator prestasinya belum mencapai target dan sebanyak enam indikator prestasinya bagus yakni mencapai target, tidak terpenuhinya target tersebut ada beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2017 ada perubahan indikator, dikarenakan pada tahun 2016 masih berpedoman pada RPJMD dan Renstra tahun 2011-2016, sehingga ada beberapa indikator yang hilang dan bertambah, akan tetapi indikator utama keberhasilan pembangunan perikanan adalah jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya serta jumlah angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih tetap ada, untuk lebih jelasnya capaian masing-masing IKU dapat dilihat dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Target dan Capaian IKU Dinas Perikanan Tahun 2016-2017

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2016 | | | Tahun 2017 | | | Keterangan |
|-----|--|---|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---|
| | | | Target | Capaian | % | Target | Capaian | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | | | |
| 1. | Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan | Jumlah Produksi Perikanan | 23.766 | 26.043,55 | 109,59 | 25.112 | 23.366,80 | 94,25 | - Produksi PerikananTangkap meliputi perikanan tangkap laut dan perairan umum - Produksi perikanan budidaya meliputi budidaya kolam, tambak, mina padi dan KJT |
| | | - Perikanan Tangkap (Ton) | 21.734 | 23.188,6 | 106,70 | 22.790 | 21.503 | 94,35 | |
| | | - Perikanan Budidaya (Ton) | 1.934 | 1.724,95 | 89,20 | 2.102 | 1.626,80 | 77,40 | |
| | | - Produk Olahan (Ton) | 98 | 130 | 132,65 | 220 | 237 | 107,72 | |
| | | Jumlah Produksi Benih Ikan (Ribuk Ekor) | 750.000 | 976.416 | 129,92 | 550.000 | 824.730 | 149,95 | Meliputi produksi benih di BBI dan UPR |
| | | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/thn) | 32,07 | 33,35 | 103,99 | 32,80 | 33,42 | 101,90 | |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat Perikanan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Yang Tangguh | Jumlah Unit Pengolah Ikan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 106,67 | |
| | | Persentase Produksi dan Penerapan Teknologi Pengolahan Ikan (%) | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 130 | |
| | | Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 3.785 | 84,11 | |
| | | Jumlah Kapal Perikanan >5 GT (Unit) | 0 | 0 | | 20 | 10 | 50 | |
| | | Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Tidak terealisasi dikarenakan persiapan cukup lama dan perlu adanya pelatihan kepada kelompok |
| 3. | Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan secara Optimal dan Berkelanjutan | Jumlah Benih Ikan yang Ditebar (Restocking) pada Kawasan Reservat dan Kawasan Konservasi Perikanan (Ekor) | 50.000 | 48.000 | 96 | 60.000 | 65.000 | 108,33 | Merupakan Upaya Pelestarian sumberdaya ikan endemik |
| | | Persentase Pelestarian Sumberdaya Perikanan (%) | 30 | 45 | 150 | 70 | 68 | 97,14 | Meliputi Pelatihan, Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pesisir dan masyarakat disekitar kawasan reservat/lubuk larangan |
| | | Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru (Kawasan) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Terbentuknya Lubuk Larangan |

Keterangan : Kalimat yang bercetak tebal merupakan IKU yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 (sebelum Revisi)

Gambar 3.1.
Grafik Persentasi Capaian IKU Dinas Perikanan
Tahun 2016 - 2017



3.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.4.1. Sasaran Strategis 1 :Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan

Terdapat tiga Indikator Kinerja dimana Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan menghimpun tiga item pengukuran kinerja dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian tersebut :

I. Jumlah Produksi Perikanan

1) Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan Umum)

Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan/menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan (Organisasi/Produsen).

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi penangkapan nelayan, produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) tahun 2017 adalah sebanyak 21.503 ton atau 94,35% dari target yang telah ditetapkan sebesar 22,790 ton. Capaian tersebut terdiri dari volume produksi perikanan laut sebanyak 20.768,50 ton dan perairan umum sebanyak 734,50 ton. Dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap ditahun 2016 sebesar 23.188,60 ton, mengalami penurunan sebesar 1.685,6 ton atau penurunan sebesar 7,27%.

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017

| IKU | Target (Ton) | Realisasi Tahun 2017 (Ton) | Capaian % |
|--|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan Umum) | 22.790 | 21.503 | 94,35 |

Selama dua tahun terakhir dari 2016- 2017 dan tahun transisi tahun 2016 produksi perikanan tangkap cenderung menurun, namun masih dalam koridor toleransi JTB perairan laut.

Kinerja (produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum) Dinas Perikanan pada tahun 2017 tidak dapat memenuhi Target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Hal ini tidak

lepas dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang tidak terduga, permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Telah terjadinya *Over Fishing* di perairan pantai (laut jalur 1)
- b. Terbatasnya SDM nelayan, terutama nahkoda kapal, dimana masih banyak nahkoda kapal perikanan >5 GT yang belum memiliki sertifikat dan masih awamnya penggunaan peralatan penangkapan ikan, seperti penggunaan *GPS fish finder*.
- c. Adanya pelarangan penggunaan jaring trawl.
- d. Adanya revitalisasi alat tangkap dari KKP RI, dimana nelayan belum terbiasa dalam penggunaannya.
- e. Stock BBM di SPBN masih kurang, dimana nelayan harus memesan sehari atau dua hari untuk mendapatkan BBM.

Tidak tercapainya Indikator Kinerja Dinas pada tahun 2017 tersebut, yang paling utama disebabkan karena kondisi alam (Eksternal) yang tidak dapat diduga, karena sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan sumberdaya yang sangat tergantung oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, kualitas air, sarana dan prasarana infrastruktur penunjang lainnya, sehingga capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Solusi/pemecahan masalah yang dirasa bisa mengatasi hal tersebut adalah :

- a. Perlu adanya penggantian kapal penangkapan ikan dengan penangkap ikan >5 GT, sehingga bisa melaut pada jalur dua.

- b. Perlu adanya pembinaan dan sertifikasi nelayan, terutama nahkoda untuk mendapatkan sertifikat dengan cara melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- c. Penggantian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
- d. Perlu adanya pembinaan kepada nelayan untuk penggunaan alat tangkap yang baru.
- e. Permintaan penambahan stock BBM kepada pihak Pertamina.

Menarik untuk diketahui laju perkembangan jumlah (volume) hasil tangkapan ikan selama lima tahun terakhir dari 2012 -2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Menurut Jenis Perairan Tahun 2012 - 2017

| Jenis Perairan | Tahun | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Perairan Laut (Ton) | 23.217,92 | 23.468 | 23.986,83 | 24.158 | 22.369,5** | 20.768,50 |
| Perairan Umum (Ton) | 860,31 | 808,85 | 811,67 | 962,83 | 819,1** | 734,50 |
| Jumlah (Ton) | 24.078,23 | 24.276,85 | 24.799* | 25.121* | 23.186,6** | 21.503 |

Keterangan :

*(Angka Pembulatan)

** (Revisi Target menyesuaikan dengan OPD baru)

2) Perikanan Budidaya (Keramba, Kolam dan Tambak)

Target produksi perikanan budidaya yang diperkuat dengan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) tahun 2017 sebesar 2.102 Ton. Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2017 sebesar 1.626,80 Ton atau capaian (77,40%) dari target sebesar 2.102 Ton. Di tahun 2017 ini sebenarnya produksi perikanan budidaya bisa lebih dari capaian yang ada, akan tetapi banyak

faktor yang mempengaruhi belum tercapainya hasil maksimal produksi perikanan budidaya disebabkan karena cukup banyaknya lahan budidaya, khususnya tambak beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Sebahagian besar lahan tambak masyarakat masih bersifat tradisional dalam pemanfaatannya, sehingga apabila terjadi pasang tinggi air akan masuk kedalam tambak dikarenakan tanggul tambak pembuatannya masih secara manual, sehingga tanggul tidak kuat menahan air dan menyebabkan ikan yang ditebar akan terbawa arus air. Dilihat dari faktor internal, pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perikanan merupakan dinas dengan typelogi A, menjadi dinas dengan typelogi C, yang artinya anggarannya pun lebih kecil daripada typelogi sebelumnya. Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi
Perikanan Buddaya Tahun 2017

| Nama IKU | Target (Ton) | Realisasi (Ton) | Capaian % |
|---|-----------------|--------------------|--------------|
| Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (tambak, Kolam, Mina Padi dan KJT) | 2.102 | 1.626,80 | 77,40 |

Jumlah produksi perikanan budidaya per jenis media Budidaya tahun 2012 - 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Menurut Jenis Media Budidaya Tahun 2012 – 2017

| Jenis Media Budidaya | Tahun | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kolam (Ton) | 1.512,60 | 2.035,70 | 2.108,30 | 2.932,30 | 1.038,74 | 1.038,74 |
| Tambak (Ton) | 1.017,30 | 266 | 473,70 | 976,34 | 671,15 | 671,15 |
| Keramba Jaring Tancap (Ton) | 297 | 94,40 | 110,70 | 350 | 15,06 | 15,06 |
| Jumlah (Ton) | 2.826,90 | 2.396,10 | 2.762* | 4.259* | 1.724,95 | 1.626,80 |

Keterangan :

*(Angka Pembulatan)

Dilihat dari Tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2012 – 2015 produksi perikanan budidaya kolam mengalami trend kenaikan positif pada tahun 2012 - 2015, walau kenaikan tersebut belum memenuhi target di tahun 2012 – 2014 yang telah ditetapkan, akan tetapi produksi perikanan budidaya ikan dalam tambak dan Keramba jaring Tancap (KJT) mengalami kenaikan yang fluktuatif, terutama mulai tahun 2013 budidaya tambak mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini disebabkan karena banyaknya tambak yang berubah fungsi menjadi kebun tanaman tahunan, akan tetapi mulai tahun 2014 Dinas Perikanan telah mencoba untuk memberikan pengertian kepada masyarakat melalui pelatihan budidaya ikan, sosialisasi, pelatihan manajemen KUB dan bantuan sarana dan prasarana budidaya tambak, dengan demikian secara langsung dan bertahap produksi perikanan budidaya tambak mulai menunjukkan kenaikan, walau belum signifikan, diharapkan kedepan produksi perikanan budidaya tambak bisa meningkat sesuai yang ditargetkan.

3) Produk Olahan

Target produksi produk olahan hasil perikanan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 237 Ton atau sebesar 7,72% dari target yang sebesar 220 Ton, kenaikan tersebut ditunjang dari pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten, selain itu pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan terus dilakukan demi menunjang pertumbuhan produk olahan hasil perikanan yang inovatif. Capaian produksi produk olahan hasil perikanan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi IKU produksi
Produk Olahan Tahun 2017

| Nama IKU | Target (Ton) | Realisasi (Ton) | Capaian % |
|---|--------------|-----------------|-----------|
| Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton) | 220 | 237 | 107,72 |

Walau ada kenaikan jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tahun 2017, masih ada beberapa permasalahan yang timbul, permasalahan tersebut adalah :

- a. Masih kurangnya bahan baku di tingkat local, terutama bahan baku untuk pembuatan kerupuk.
- b. Masih kurang maksimalnya kualitas packaging.
- c. Masih terbatasnya akses pemasaran hasil pengolahan perikanan.
- d. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani pemasaran dan promosi produk daerah.

Dengan demikian dari beberapa permasalahan tersebut solusi dalam pemecacahan permasalahan yang diinginkan untuk perbaikan ditahun berikutnya adalah :

- a. Harus ada pembagian yang jelas hasil tangkapan nelayan yang mana hasil tangkapan tersebut mau dipasarkan dalam bentuk segar ataupun yang mau diolah.

- b. Perlu adanya pengusahaan packaging yang menarik, dimana packaging merupakan unsur terpenting dalam pemasaran produk olahan hasil perikanan.
- c. Harus diperkuat koordinasi yang baik dengan instansi yang berwenang.

II. Jumlah Produksi Benih Ikan

Pada tahun 2017 ditargetkan capaian jumlah produksi benih ikan di BBI dan UPR sebesar 550.000 ekor. Dengan mengetahui produksi benih ikan BBI (lokal) dan UPR maka dapat dihitung seberapa besar kebutuhan benih ikan di daerah, sehingga kebutuhan benih ikan di daerah tidak keseluruhannya dipasok dari lain daerah.

Pada tahun 2017 jumlah produksi benih di BBI dan UPR sebesar 824.730 ekor atau sebesar 149,95% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI dan UPR Tahun 2017

| Nama IKU | Target 2017 (Ekor) | Realisasi 2017 (Ekor) | Capaian % |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI dan UPR (Ekor) | 550.000 | 824.730 | 149,95 |

Angka jumlah produksi benih ikan di BBI periode tahun 2012 - 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Perkembangan Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI
Tahun 2012 – 2017

| Jenis Media Budiaya | Tahun | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI (Ekor) | 167.395 | 133.050 | 423.720 | 493.296 | 976.416 | 824.730 |
| Jumlah | 167.395 | 133.050 | 423.720 | 493.296 | 976.416 | 824.730 |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahun selama periode 2011-2016, jumlah produksi benih ikan di BBI dan UPR meningkat akan tetapi jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga berpengaruh pada hasil kinerja dinas akan tetapi mulai tahun 2016 capaian produksi benih ikan mengalami kenaikan sebesar 130,19% dari target 750.000 ekor menjadi 976.416 Ekor dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016, penerunan sebesar 824.730 Ekor atau sebesar 15,53%.

Selama tahun 2011-2015 BBI masih diolah oleh dinas, akan tetapi mulai tahun 2016 BBI menjadi UPT yang mempunyai tanggung jawab kepada dinas untuk mengolah urusannya sendiri, dibentuknya UPTD ini diharapkan produksi benih ikan dapat meningkat setiap tahunnya.

Dalam menjalankan dan mengelolah BBI ini masih dijumpai permasalahan yang dihadapi, mulai dari permasalahan secara internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan ini antara lain :

1. Terbatasnya tenaga ahli dalam bidang ilmu budidaya perikanan yang ditempatkan di BBI, sampai saat ini sumberdaya manusia hanya ada satu orang tenaga ahli dan enam orang tenaga pembantu teknis pembenihan.

2. Sarana dan prasarana yang belum cukup memadai untuk proses pembenihan maupun pemijahan.
3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam masalah pembenihan.
4. Kualitas air di BBI yang sering berubah-ubah, sehingga mengakibatkan benih yang baru berhasil dipijahkan banyak yang tidak tahan terhadap perubahan air di BBI.

Tindak lanjut yang diharapkan untuk meningkatkan produksi benih ikan di BBI antara lain :

1. Adanya penambahan tenaga ahli budidaya, terutama PNS, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab penuh kepada dinas.
2. Adanya pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana yang sekarang belum ada dan atau fungsinya tidak maksimal.
3. Perlu adanya pembuatan SOP dalam masalah pembenihan.
4. Perlu dibangunnya saluran penyaring, sehingga air pasang dari luar tidak masuk langsung ke dalam kolam, yang bisa mempengaruhi kehidupan induk maupun benih ikan.

III. Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun, mengenai perhitungan konsumsi ikan ini Dinas Perikanan menggunakan metode survey konsumen (Cosumer Panels). Survey dilakukan dengan cara metode sampling. Populasi distratifikasi untuk memperoleh responden berdasarkan pendapatan,

umur dan lokasi. Melalui penghitungan dengan metode ini akan diperoleh informasi mengenai jenis ikan yang dikonsumsi, tempat ikan dikonsumsi (di dalam Rumah Tangga atau di luar rumah tangga), pola preferensi konsumen dan lainnya.

Pada tahun 2017 ditargetkan capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah sebesar 32,80 kg/kapita/Tahun. Dengan mengetahui besarnya angka konsumsi ikan maka dapat diketahui besarnya kebutuhan ikan serta mengetahui jenis ikan yang dibutuhkan oleh suatu daerah/wilayah.

Pada tahun 2017, capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah adalah sebesar 33,42 kg/kapita, atau tercapai 101,89% dari target yang telah ditetapkan. Rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah pada tahun 2017 ini meningkat sebesar 0,07% atau 0,20% bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 33,35 Kg/Kapita/Tahun.

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Konsumsi Ikan
Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017

| Nama IKU | Target Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Capaian % |
|--|-------------------|----------------------|-----------|
| Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Kab. Tanjung jabung Barat (Kg/Kpt/Thn) | 32,80 | 33,48 | 101,89 |

Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2012 – 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.10. sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Perkembangan Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2012 - 2017

| Jenis Media Budiaya | Tahun | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat (Kg/Kpt/Thn) | 31,87 | 31,88 | 32,73 | 33,32 | 33,35 | 33,48 |
| Jumlah | 31,87 | 31,88 | 32,73 | 33,32 | 33,35 | 33,48 |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahun selama periode 2012-2017, tingkat konsumsi ikan per kapita daerah terus meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program-program peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Meskipun demikian upaya meningkatkan konsumsi ikan tetap harus dilaksanakan dan ditingkatkan dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan, terutama di daerah-daerah yang konsumsi ikannya masih rendah mengingat tingkat konsumsi ikan masyarakat belum merata.

Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititik beratkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (*supply*) hasil perikanan, terutama pada peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan, mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau (*accessibility*) hasil perikanan, serta mendorong peningkatan konsumsi (*consumption*) hasil perikanan.

Beberapa program yang dapat mendorong tingkat konsumsi yang sudah diinisiasi dan dilaksanakan yakni:

1. Untuk menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (*supply*) hasil perikanan, terutama pada peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan, Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan berupa penguatan armada penangkapan ikan, pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
2. Untuk menjamin kemudahan masyarakat dalam menjangkau (*accessibility*) hasil perikanan. Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan berupa pembangunan pasar ikan (dana APBN), rehabilitasi pasar tradisional dan pengualatan penanganan pasca penangkapan/panen dengan pembangunan pabrik es.
3. Untuk menjamin peningkatan konsumsi (*consumption*) hasil perikanan. Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan dengan pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yang pembentukannya dikukuhkan oleh Gubernur Jambi.

3.4.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat Perikanan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan yang Tangguh

Terdapat lima Indikator Kinerja yang menghimpun lima item pengukuran kinerja dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian tersebut :

IV. Jumlah Unit Pengolahan Ikan

Unit Pengolahan Ikan merupakan suatu bentuk usaha bersma/kelompok atau perorangan dalam pengelolaan sumberdaya ikan untuk dijadikan produk turunan dari bahan baku awal. Pada tahun 2017 target terbentuknya usaha unit pengolahan ikan meningkat sebesar 16 Unit pengolahan ikan dari target sebesar 15 Unit atau sebesar 101,90%.

Tabel 3.11.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Unit Pengolahan Ikan
Tahun 2017

| Nama IKU | Target 2017 (Unit) | Realisasi 2016 (Unit) | Capaian % |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Jumlah Unit Pengolahan Ikan (Unit) | 15 | 16 | 101,90 |

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah unit pengolahan hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga tingkat persentase peningkatan ekonomi kabupaten juga meningkat, diharapkan juga dengan bertambahnya unit pengolahan ikan ada pergeseran penggerak ekonomi daerah yang semula di dominiasi oleh pertanian dan pertambangan menjadi industry atau jasa.

V. Persentase Produksi dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Ikan

Selama ini penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan masih didominasi cara tradisional, hal ini untuk peningkatan produksi belum bisa maksimal dan kualitas maupun kuantitas masih jauh dari Standar Nasional, oleh karena itu mulai tahun 2017 dilakukan upaya untuk memberikan pelatihan/pembinaan kepada pengolah untuk menerapkan teknologi yang tepat guna dan bestandar dengan cara melakukan kerja sama dengan dinas provinsi, badan POM, KKP dan instansi terkait.

Pada tahun 2017 ada kenaikan penerapan teknologi sebesar 13% dari target 10% atau naik sebesar 130%.

Tabel 3.12.
Target dan Realisasi IKU Persentase Produksi dan
Penerapan Teknologi Pengelolaan Ikan
Tahun 2017

| Nama IKU | Target 2017 (%) | Realisasi 20167(%) | Capaian % |
|--|-----------------|--------------------|-----------|
| Persentase Produksi dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Ikan (%) | 10 | 13 | 130 |

Dilihat dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada trend kenaikan produksi dan penerapan teknologi pengelolaan ikan, dimana pada tahun 2016 dan 2017 Dinas Perikanan cukup banyak mendapatkan bantuan dari provinsi dan pusat dalam peningkatan penerapan teknologi pengelolaan ikan, yaitu dengan dibangunnya sarana dan prasarana pengelolaan hasil perikanan yang dipusatkan di PPP Kaula Tungkal.

VI. Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Rumah Tangga Perikanan merupakan rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/pembudidayaan/pasca panen ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

Sesuai hasil survey pendataan di lapangan jumlah Rumah Tangga Perikanan tidak dapat memenuhi target sebesar 4.500 RTP, dimana pada tahun 2017 ini sesuai data jumlah RTP sebesar 3.785 RTP atau sebesar 84,11%.

Tabel 3.13.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Rumah Tangga Perikanan
Tahun 2017

| Nama IKU | Target 2017 (RTP) | Realisasi 2017 (RTP) | Capaian % |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) | 4.500 | 3.3.785 | 84,11 |

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah RTP tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan survey yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan metode, karena penentuan RTP cukup sulit, terutama RTP pembudidaya dan pasca panen, dimana masyarakat tersebut sumber utama penghasilnya bukan dari budidaya ikan dan pasca panen, akan tetapi ada sumber utama, yaitu pekebun dan wiraswasta, hal inilah yang menjadi kendala pendataan jumlah RTP, selain itu petugas yang melakukan survey sangat terbatas, dalam tingkatan kabupaten hanya ada 3 petugas pendata. Oleh karena itu pada tahun mendatang diharapkan ada penambahan petugas tersebut untuk melakukan pendataan, karena data yang akurat merupakan pokok utama dalam menentukan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

VII. Jumlah Kapal Perikanan >5 GT

Kapal penangkapan ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini masih didominasi oleh kapal penangkapan ikan kurang dari 3 GT, dimana kapal penangkap ikan tersebut hanya bisa menangkap ikan di daerah perairan pantai (lajur 1).

Sangat disadari untuk peningkatan kapal penangkapan ikan dari <3 GT ke kapal >5 GT diperlukan pendanaan yang cukup besar, akan tetapi apabila kita bersungguh-sungguh dengan upaya pengajuan proposal ke pusat pergantian ini kemungkinan bisa tercapai, sehingga jumlah produksi perikanan dapat meningkat dan akhirnya ekonomi masyarakat, khususnya nelayan meningkat juga.

Pada tahun 2017 target jumlah kapal >5 GT sebesar 20 Unit akan tetapi yang tercapai hanya sebanyak 10 unit, kapal ini merupakan bantuan dari KKP RI pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 3.14.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Kapal Perikanan > 5 GT
Tahun 2017

| Nama IKU | Target 2017 (Unit) | Realisasi 2017 (Unit) | Capaian % |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Jumlah Kapal Perikanan >5 GT (Unit) | 20 | 10 | 50 |

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa capaian jumlah kapal perikanan >5 GT baru mencapai 50%, hal ini disebabkan karena sangat besarnya anggaran yang diperlukan, dimana daerah masih mempunyai prioritas utama dalam peningkatan infrastruktur jalan, air bersih, jembatan, pendidikan dan kesehatan, walau demikian dengan keterbatasan anggaran di Dinas Perikanan tidak mengurangi usaha kita dalam mengusahakan peningkatan kapal >5 GT atau lebih ke provinsi dan pusat.

VIII. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Unit Pembenihan Rakyat (UPR) merupakan usaha pembenihan ikan mandiri yang diusahakan oleh kelompok atau perorangan, sampai dengan tahun 2017 jumlah UPR di Kabupaten Tanjung jabung Barat berjumlah sebanyak 4 kelompok, pada awal penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditargetkan ada dua kelompok UPR baru, akan tetapi karena berbagai kendala, terutama kesiapan lahan, sumberdaya dan sarana prasarana pembenihan yang belum siap, maka pada tahun 2017 realisasi pembentukan UPR baru nihil atau 0%.

3.4.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan secara Optimal dan Berkelanjutan

Terdapat tiga Indikator Kinerja yang menghimpun tiga item pengukuran kinerja dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian tersebut :

IX. Jumlah Benih Ikan yang Ditebar (Restocking) pada Kawasan Reservat dan Kawasan Konservasi Perikanan

Tujuan penebaran (Restocking) benih ikan/udang adalah memulihkan kembali sumberdaya ikan/udang yang ada di suatu daerah/kawasan demi keberlanjutan sumberdaya ikan. Pada tahun 2017 restocking dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Desa Teluk Pengkah dan Desa Paukau Pauh, benih ikan yang ditebar merupakan benih ikan sesuai daerah, yaitu ikan baung, dikedua lokasi tersebut ditebar sebanyak 65.000 ekor.

X. Jumlah Benih Ikan yang Ditebar (Restocking) pada Kawasan Reservat dan Kawasan Konservasi Perikanan

Pada tahun 2017 ditargetkan capaian persentase Pelestarian sumberdaya Perikanan sebesar 70%. Dengan mengetahui besarnya angka presentase pelestarian sumberdaya perikanan maka dapat diketahui besarnya peningkatan kualitas lingkungan wilayah pesisir, laut dan umum serta peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir, laut dan umum dalam menjaga lingkungan.

Pada tahun 2017, capaian presentase pelestarian sumberdaya perikanan sebesar 68% atau tercapai sebesar 97,14% dari target yang telah ditentukan, mengacu pada hal tersebut walau capaian tidak memenuhi target yang telah ditentukan, masih cukup tinggi masyarakat antusias dalam pelestarian sumberdaya perikanan, hal ini mengacu pada ramainya peserta acara

sosilaisai/pembinaan mengenai pentingnya menjaga pelestarian sumberdaya perikanan dan berperan aktifnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kabupaten Tanjung jabung Barat, sehingga salah satu POKMASWAS sempat mendapatkan penghargaan dari KKP RI.

Tabel 3.15.
Target dan Realisasi IKU Persentase Pelestarian
Sumberdaya Perikanan
Tahun 2017

| Nama IKU | Target 2017 (%) | Realisasi 2017 (%) | Capaian % |
|---|-----------------|--------------------|-----------|
| Presentase Pelestarian Sumberdaya Perikanan (%) | 70 | 68 | 97,14 |

Meskipun capaian IKU ini cukup besar tetapi masih ada permasalahan yang sangat mendasar, terutama memberikan pengertian kepada masyarakat pesisir untuk tidak membuang sampah sembarangan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan action yang masih minim, memang disadari untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan tidak semudah membalik telapak tangan, banyak permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Dari berbagai catatan yang ada, sebagai akibat dari bertumpuknya kegiatan di wilayah pesisir dan laut Tanjung Jabung Barat, muncul berbagai permasalahan yang memiliki implikasi terhadap bentuk pengelolaannya, antara lain:

1. Kurang diperhatikannya keterkaitan ekosistem daratan dan lautan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Selama ini pelaksanaan pembangunan lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada di daratan, sehingga pola pemanfaatan ruang di kawasan pesisir cenderung tidak

memberikan kesempatan yang memadai bagi upaya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Selain itu, pengelolaan lingkungan di kawasan hulu juga cenderung tidak mempertimbangkan dampak yang diterima oleh wilayah pesisir.

2. Pertumbuhan kegiatan di wilayah pesisir yang cepat dan berpotensi cenderung melebihi daya dukung lingkungan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan wilayah pesisir, dan konflik pemanfaatan ruang antar-kegiatan dan antar-pelaku.
3. Kecenderungan daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan (*over-exploitation*) tanpa menghiraukan kualitas lingkungan akan berdampak pada penurunan potensi tersebut, yang akhirnya akan menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan biaya besar untuk *recovery*. Kondisi ini pada gilirannya justru akan mengakibatkan penurunan PAD.
4. Tidak tertutup munculnya permasalahan lain seperti kurang terkoordinasinya program-program pembangunan lintas sektor dan wilayah yang dapat menimbulkan konflik antar-daerah otonom dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan serta penyelesaian dampak lingkungan lintas-daerah.
5. Masih belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan. Pendekatan pelaksanaan pembangunan yang *sentralistik* dan didominasi oleh pemerintah di masa lalu merupakan faktor yang menghambat upaya

pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari ketidakpedulian masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan bersama.

Berkaca pada persoalan tersebut diatas, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tersebut memikirkan bersama terhadap pentingnya suatu bentuk kolaborasi dan terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Suatu konsep pemikiran yang memerlukan penanganan dan pemikiran serius dan secara bersama-sama, lintas sektor, lintas wilayah beserta kepentingan didalamnya.

Beberapa persoalan diatas juga mengindikasikan perlu adanya satu strategi besar dimasa mendatang, yaitu sebuah strategi untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih baik, dan menuju kepada keterpaduan perencanaan, baik antar sektor maupun antar wilayah. Hal ini didasari bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan di suatu wilayah pesisir dan laut beserta permasalahan yang ada, baik aktual aupun potensial. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut secara terpadu pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat diwilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rumusan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut secara terpadu disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi aktual yang ada, dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional, otonomi daerah dan globalisasi.

XI. Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru

Sampai dengan tahun 2017 jumlah reservat/lubuk larangan berjumlah tujuh kawasan, dimana pada tahun 2017 lubuk larangan bertambah satu kawasan dari target satu kawasan, berarti capaian pembentukan reservat/lubuk larangan baru tercapai 100%.

Tabel. 3.16.
Target dan Realisasi IKU Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru Tahun 2017

| Nama IKU | Target 2017 (Kawasan) | Realisasi 2017 (Kawasan) | Capaian % |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru (Kawasan) | 1 | 1 | 100 |

Selama lima tahun kebelakang pembentukan reservat/lubuk larangan belum pernah dilakukan, dan mulai tahun 2017 mulai dilaksanakan, hal ini disebabkan pentingnya upaya penjagaan ekosistem sumberdaya perikanan di suatu daerah tertentu, terutama pada sumberdaya ikan.

3.5. Realisasi Anggaran

3.5.1. Kinerja Anggaran Dinas Perikanan

A. APBD II dan DAK

Di tahun 2017 realisasi keuangan (Khususnya Belanja Langsung) ditargetkan mencapai 93%, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan akhir tahun 2017 realisasi keuangan mencapai angka sebesar Rp. 5.765.543.199 atau 88,64% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.504.371.350 atau belum memenuhi angka target,

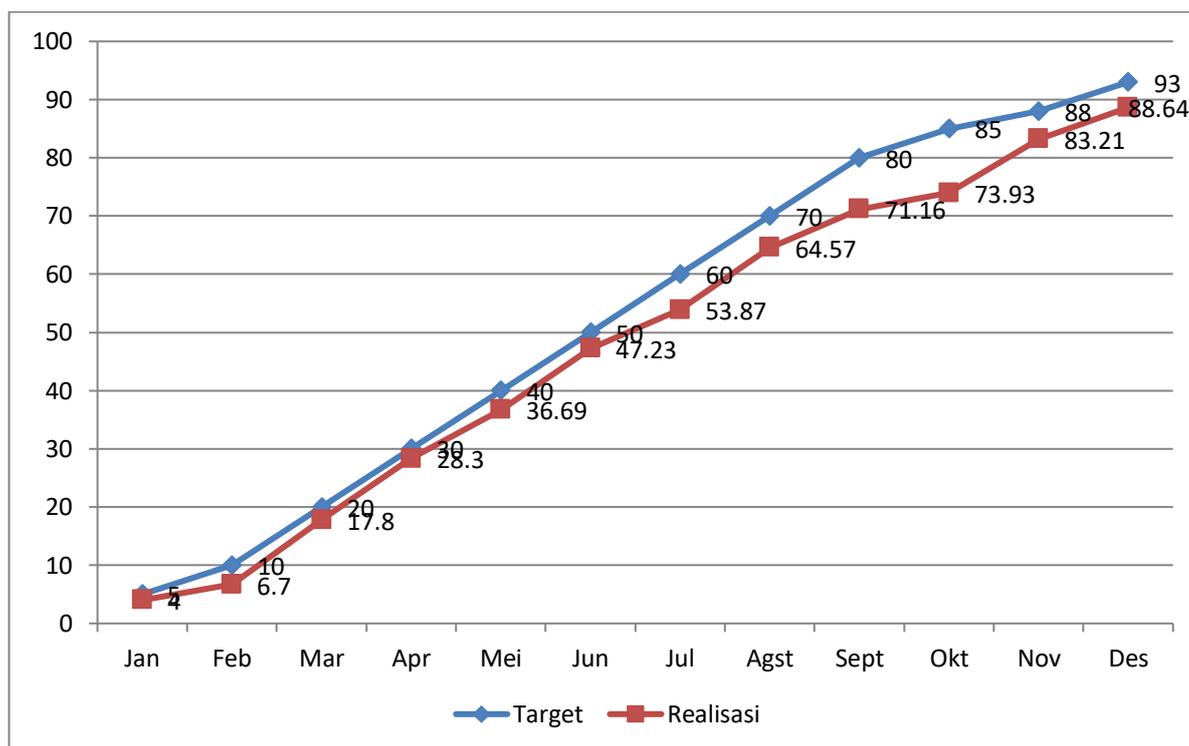
walau demikian capaian fisik mencapai 97,14 yang dikategorikan sebagai sangat baik.

Tabel 3.17.
Rincian Anggaran dan Capaian Keuangan
Dinas Perikanan
Tahun 2017

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 2.862.136.500,- | 2.160.373.135,- | 75,49 |
| 2. | Belanja Langsung | 6.504.371.350,- | 5.765.543.199,- | 88,64 |
| Jumlah | | 9.366.507.850,- | 7.925.916.334,- | 84,61 |

Jika diurai per bulannya, target dan rencana penyerapan dan realisasi anggaran Dinas Perikanan (khususnya Belanja Langsung) setiap bulannya selama tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.2. di bawah ini.

Gambar. 3.2.
Grafik Pola Penyerapan Anggaran Tahun 2017



Tingkat kinerja keuangan tahun ini ada peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat penyerapan tahun 2016 sebesar 87,64% yakni mengalami peningkatan

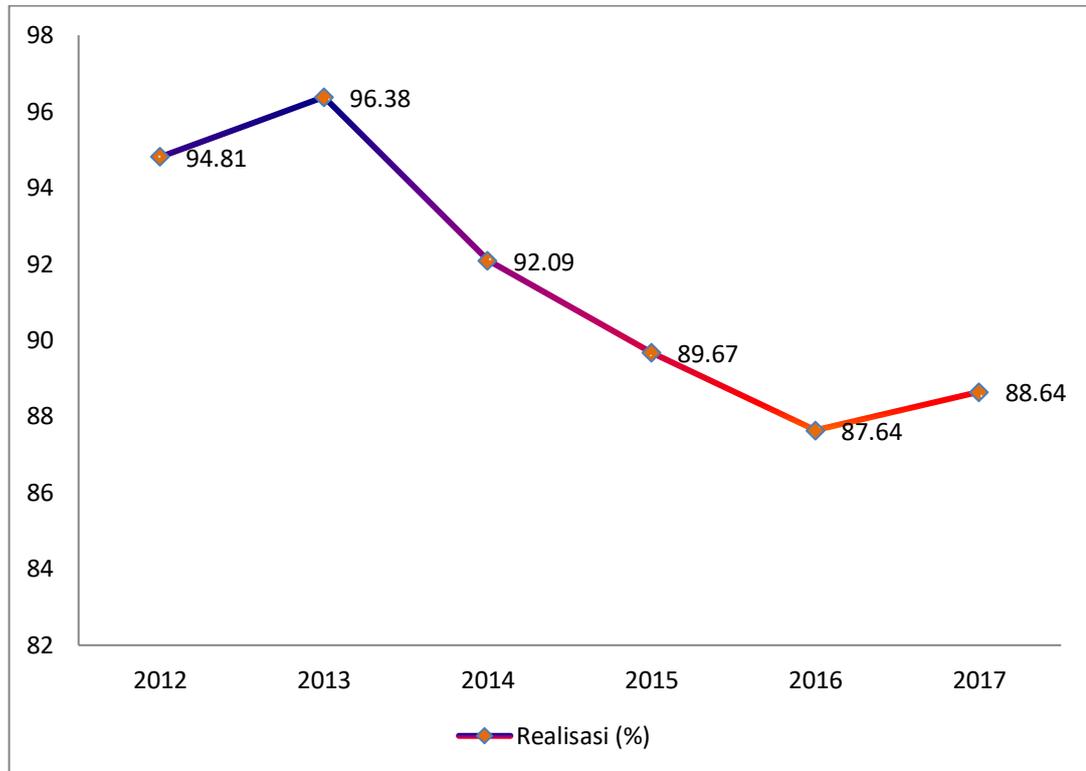
sebesar 1,00%. Namun dilihat pola penyerapan hampir sama dengan tahun 2016 dengan ciri penyerapan mulai melaju cepat pada akhir Triwulan IV yaitu pada November dan Desember.

Kinerja keuangan Dinas Perikanan selama 2012-2017, menunjukkan jumlah pagu anggaran mengalami fluktuasi dengan tingkat realisasi anggaran cenderung naik pada tahun 2012, hal ini dikarenakan pada tahun 2012 ada dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 4,5 Milyar, pada tahun 2013 mengalami penurunan anggaran sebesar 1.026.106.170 atau sebesar 8,67%, ditahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 212.849.659 atau 1,97%, ditahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 1.454.349.000 atau 13,19%, ditahun 2016 mengalami penurunan anggaran yang cukup besar yaitu 8.750.117.346 atau 70,09%, dan ditahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2.769.208.696 atau 57,42%, meningkatnya anggran pada tahun 2017 juga dipengaruhi dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 1,54 Milyar untuk lebih jelasnya gambaran anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2012 - 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Anggaran Dinas Perikanan
Tahun 2012 - 2017

| Uraian | Tahun | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pagu (Milyar) | 11.844.187.511 | 10.818.081.341 | 11.030.931.000 | 12.485.280.000 | 3.735.162.654 | 6.504.371.350 |
| Realisasi (milyar) | 11.228.882.238 | 10.426.225.317 | 10.158.877.466 | 11.194.054.662 | 3.273.329.139 | 5.765.543.199 |
| Persentase (%) | 94,81 | 96,38 | 92,09 | 89,67 | 87,64 | 88,64 |

Gambar. 3.3.
Grafik Pertumbuhan Realisasi Anggaran
Dinas Perikanan
Tahun 2012 - 2017



Pagu anggaran Dinas Perikanan Tahun 2017 bersumber dari APBD II berupa Rupiah Murni berupa Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.862.136.500, Belanja Langsung sebesar Rp. 6.504.371.350 (termasuk dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan). Pagu anggaran ini dialokasikan untuk 3 (tiga) bidang yang rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 3.19. sebagai berikut :

Tabel 3.19.
Anggaran Dinas Perikanan
Tahun 2017

| No | Bidang | Pagu | Realisasi |
|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| I. BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | |
| 1. | Sekretariat | 2.862.136.500 | 2.160.373.135 |
| II. BELANJA LANGSUNG | | | |
| 1. | Sekretariat | 1.658.581.850 | 1.443.397.881 |
| 2. | Perikanan Budidaya | 2.232.677.000 | 2.019.967.894 |
| 3. | Perikanan Tangkap | 2.613.112.500 | 2.302.177.424 |
| Jumlah | | 6.504.371.350 | 5.765.543.199 |

Dinas Perikanan pada tahun 2017 memperoleh pagu anggaran awal menurut jenis belanjanya, yaitu : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.862.136.500, Belanja Langsung sebesar 6.504.371.350 seiring dengan adanya kebijakan dalam tahun berjalan, pagu anggaran Dinas Perikanan mengalami perubahan, berikut rangkaian perubahan anggaran selama tahun 2017.

Tabel 3.20.
Perubahan Anggaran Dinas Perikanan
Tahun 2017

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PROGRAM DALAM RPJMD | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 518.966.850 | 549.066.850 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 830.190.000 | 832.190.000 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 26.800.000 | 26.800.000 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 195.525.000 | 195.525.000 |
| 6 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.232.677.000 | 2.232.677.000 |
| 7 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 2.522.112.500 | 2.613.112.500 |
| JUMLAH | | 6.381.271.350 | 6.504.371.350 |

B. Tugas Pembantuan (TP) Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mendapatkan alokasi dana TP, akan tetapi Dinas Perikanan Mendapatkan Bantuan Kapal penangkapan ikan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21.
Target dan Realisasi Bantuan
Kapal Penangkapan Ikan
Tahun 2017

| No. | Uraian Kegiatan | Tahun 2017 | |
|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | Target (Unit) | Realisasi (Unit) |
| 1. | Kapal Ukuran < 5 GT | 50 | 40 |
| 2. | Kapal Ukuran 10 GT | 5 | 0 |
| 3. | Kapal Ukuran 20 GT | 5 | 5 |
| Jumlah | | 60 | 45 |

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa bantuan kapal penangkapan ikan tahun 2017 ini tidak memenuhi target dari 60 unit yang terealisasi sebanyak 45 Unit atau (75%). Hal ini dikarenakan, menurut informasi dari KKP RI bahwa permasalahan terletak pada keterbatasan galangan, dimana galangan tidak bisa menyelesaikan kontrak sesuai yang ditargetkan.

3.5.2. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan analisis keuangan terhadap kegiatan belanja langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum keuangan dapat terserap dengan baik. Meskipun terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (*silpa*) tetapi hal tersebut lebih merupakan bentuk efisiensi anggaran dan tidak mempengaruhi capaian kinerja hasil (*outcome*). Secara rinci analisis pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Lampiran.

3.6. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan indikator *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$
$$SE = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE maka Kegiatan dianggap Efisien
Jika IE < SE maka Kegiatan Dianggap Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2017, dari 13 Kegiatan Utama dan 20 Kegiatan Rutin Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada empat kegiatan yang tidak efisien selebihnya kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara (0,89) hingga (-0,01). Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Diharapkan pada waktu yang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 22 dibawah ini :

Tabel 3.22.
Analisis Efisiensi Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2017

| Program/Kegiatan | Rata-rata % | | Indek Efisiensi | Standar Efisiensi | Kategori | Tingkat Efisiensi |
|--|----------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Capaian Target | | | | | |
| | Input | Output | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5=(4:3) | 6 | 7 | 8=5-6:6 |
| I. KEGIATAN UTAMA | | | | | | |
| <i>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</i> | | | | | | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | |
| - Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan | 89,84 | 98,34 | 1,09 | 1,00 | EFISIEN | 0,09 |
| - Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau | 96,79 | 100,00 | 1,03 | 1,00 | EFISIEN | 0,03 |
| - Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya | 64,59 | 81,50 | 1,26 | 1,00 | EFESIEN | 0,26 |
| - Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) | 96,53 | 98,21 | 1,02 | 1,00 | EFESIEN | 0,02 |
| - Pembengis dan UPBAP Tj. Labu | | | | | | |
| - Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan | 83,14 | 80,06 | 0,96 | 1,00 | EFISIEN | -0,04 |
| - Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN | 84,97 | 100,00 | 1,18 | 1,00 | EFISIEN | 0,18 |
| - Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau | 88,43 | 100,00 | 1,13 | 1,00 | EFISIEN | 0,13 |
| <i>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</i> | | | | | | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | |
| - Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan | 83,02 | 89,28 | 1,08 | 1,00 | EFISIEN | 0,08 |
| - Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan | 75,20 | 74,28 | 0,99 | 2,00 | TIDAK EFISIEN | -0,01 |
| - Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan | 70,13 | 77,24 | 1,10 | 3,00 | TIDAK EFISIEN | 0,10 |
| - Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan | 33,97 | 64 | 1,88 | 1,00 | EFISIEN | 0,88 |
| - Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 94,86 | 96,3 | 1,02 | 1,00 | EFISIEN | 0,02 |
| - Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan SDI | 97,08 | 96,98 | 1,00 | 2,00 | TIDAK EFISIEN | 0,00 |
| <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | | | | | | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | |
| - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 | 95 | 1,89 | 1,00 | EFISIEN | 0,89 |
| - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 69,33 | 95 | 1,37 | 1,00 | EFISIEN | 0,37 |
| - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 100,00 | 100 | 1,00 | 1,00 | EFISIEN | 0,00 |
| - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | EFISIEN | 0,00 |
| - Penyediaan alat tulis kantor | 97,93 | 100 | 1,02 | 1,00 | EFISIEN | 0,02 |
| - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 52,04 | 63 | 1,21 | 1,00 | EFISIEN | 0,21 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 91 | 100 | 1,10 | 1,00 | EFISIEN | 0,10 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Perundang-Undangan | 97 | 100 | 1,03 | 1,00 | EFISIEN | 0,03 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - keluar Daerah | 100 98,96 | 100 100 | 1,00 1,01 | 1,00 1,00 | EFISIEN EFISIEN | 0,00 0,01 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | |
| - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 77,99 | 100 | 1,28 | 1,00 | 0 | 0,28 |
| - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 98,96 | 100 | 1,01 | 1,00 | EFISIEN | 0,01 |
| - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 97 | 100 | 1,03 | 1,00 | EFISIEN | 0,03 |
| - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 72 | 68,86 | 0,96 | 1,00 | TIDAK EFISIEN | -0,04 |
| - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 98 | 100 | 1,02 | 1,00 | EFISIEN | 0,02 |
| - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 56,10 | 100 | 1,78 | 1,00 | EFISIEN | 0,78 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | |
| - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 91 | 100 | 1,10 | 1,00 | EFISIEN | 0,10 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Aparatur | | | | | | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | |
| - Pengembangan SDM | 65,00 | 88 | 1,35 | 1,00 | EFISIEN | 0,35 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | |
| - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 78,49 | 79 | 1,01 | 1,00 | EFISIEN | 0,01 |
| - Pengumpulan dan Pengolahan Data-data Statistik | 92,12 | 93 | 1,01 | 1,00 | EFISIEN | 0,01 |

BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2017 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Sedangkan untuk capaian keuangannya Dinas Perikanan tahun 2017 sebesar 88,64% naik sedikit bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang sebesar 87,64% atau kenaikan sebesar 1,00%.

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dan mengacu pada target Perangkat Daerah, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2017 ada tujuh indikator atau 63,63% yang melebihi target, sedangkan lima indikator atau 36,37% tidak memenuhi target, akan tetapi ada kenaikan dalam hal jumlah setiap tahunnya. Kendala dan permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan tidak tercapainya target ketiga indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
2. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Perikanan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dilihat dari capaian beberapa indikator kinerja, walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Capaian indikator kinerja Dinas Perikanan tahun 2017 juga didukung dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan yang cukup besar dalam Program Pengembangan Balai Benih Ikan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat skala kecil pembudidaya dan nelayan, selain itu juga ditunjang

dengan adanya bantuan kapal penangkapan ikan yang berjumlah sebanyak 45 unit.

LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Perikanan dan Kelautan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LAKIP sangat diharapkan sehingga LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

Kuala Tungkal,

J. ZABUR RUSTAM, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590129 198503 1 003

